

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah proses atau alat untuk mencapai tujuannya yaitu permasalahan kesejahteraan masyarakat, dimana negara tersebut semakin maju ketika ada peningkatan pada kesejahterannya. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mengurangi pengangguran ataupun kemiskinan yang ada (Rustam 2010). Selain pertumbuhan ekonomi salah satu aspek yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan ekonomi adalah seberapa besar efektifitas penggunaan sumber daya yang tersedia (Yacoub 2012).

Kemiskinan di negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun beberapa negara telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional (Sartika et al. 2016). Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah tersebut (Christianto, 2013) . Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian.

Kemiskinan merupakan isu sentral bagi setiap negara di dunia, khususnya bagi negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan akhir suatu negara. Berbagai pemikiran maupun konsep-konsep tentang kemiskinan sudah dikaji dan diadaptasi diberbagai negara namun

tidak membuahkan hasil yang memuaskan, dalam konteks ini Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah berumur 57 tahun, masih dihinggap oleh masalah kemiskinan dimana 14% rakyat Indonesia dari kurang lebih 240 juta jiwa saat ini masih dikategorikan sebagai rakyat miskin dengan menggunakan indikator berpendapatan 1 \$ perhari, artinya masih ada sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia. Yang lebih ironis apabila kita menggunakan indikator dari bank dunia dimana rakyat miskin adalah orang berpendapatan kurang dari 2\$ perhari maka angka tersebut melonjak menjadi 35%. (World Bank Document, 2015).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat dalam lima tahun terakhir dibandingkan dengan negara-negara kawasan, ternyata belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga ternyata tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dapat mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, serta belum menghilangkan tingkat disparitas antara golongan kaya dan golongan miskin.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Suparlan (2000) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja. Lebih jauh lagi, kemiskinan berarti suatu kondisi di mana orang atau kelompok orang tidak mempunyai kemampuan, kebebasan, aset dan aksesibilitas untuk kebutuhan mereka di waktu yang akan datang, serta sangat rentan (*vulnerable*) terhadap resiko dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit dan peningkatan secara tiba-tiba atas harga-harga bahan makanan dan uang sekolah (UNCHS, 1996; Pandji-Indra, 2001).

Lingkar perangkap kemiskinan (*the vicious circle of poverty*), atau dengan singkat perangkap kemiskinan, adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Teori ini diperkenalkan oleh Nurkse, seorang ahli ekonomi yang merintis penelaahan mengenai masalah pembentukan modal di negara berkembang.

World Bank (2002) mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi

di daerah yang bersangkutan. Indikator pembangunan infrastruktur yang penting adalah saluran irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama transportasi. Indikator lain dari karakteristik faktor komunitas adalah akses yang sama terhadap usaha atau pekerjaan seperti keberadaan lembaga keuangan dan industry.

Menurut Jhingan (2000), kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standard hidup yang layak. Seringkali masalah kemiskinan timbul bersama dengan masalah pengangguran. Kedua masalah ini erat kaitannya dengan tinggi rendahnya kualitas Indeks Pembangunan Manusia. Dengan rendahnya kualifikasi pendidikan seseorang membuat dirinya terbatas untuk mencari lapangan kerja. Berangkat dari realita empiris tersebut, maka salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia. Adapun indikator Indeks Pembangunan Manusia yaitu Tingkat Pendidikan, Kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan Angka Melek Huruf. Penanggulangan kemiskinan menjadi penting karena jika tidak diatasi segera mungkin maka kemiskinan akan berdampak pada level yang lebih jauh seperti kualitas kehidupan manusia dan kesehatan (Groce, 2011).

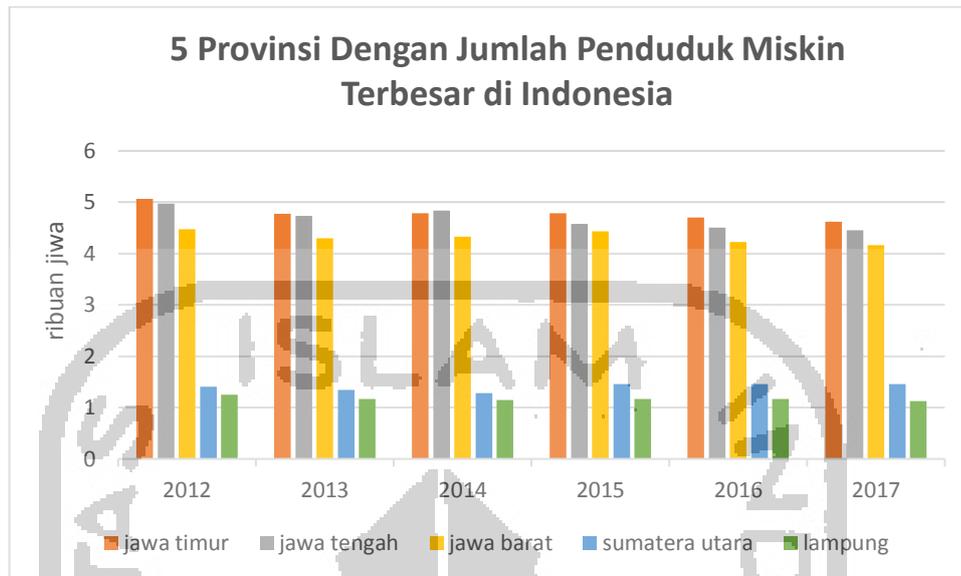
Tabel 1.1

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	PRESENTASE PENDUDUK MISKIN
2012	29.132.40	23.62
2013	28.066.60	22.84
2014	28.280.01	22.21
2015	28.592.79	22.35
2016	28.005.39	21.56
2017	27.771.22	20.76

Sumber *Badan Pusat Statistik (BPS)*

Pada Tabel 1.1 bisa kita lihat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2012, akan tetapi pada tahun 2013 penduduk miskin berkurang sangat pesat dari 29.132.40 menjadi 28.066.60. Tetapi pada tahun berikutnya yaitu 2014 mengalami kenaikan kembali yang bisa kita golongan mengalami sedikit kenaikan, Lalu bisa kita simpulkan bahwasannya jumlah kemiskinan di Indonesia tergolong fluktuatif yaitu mengalami kenaikan dan penurunan di tahun-tahun berikutnya.



Sumber *Badan Pusat Statistik (BPS)*

Gambar 1.1

5 Provinsi Dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbesar di Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.1 tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia diduduki peringkat pertama oleh provinsi Jawa Timur, lalu disusul oleh Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung dan Provinsi Lainnya. Kemiskinan di Jawa Timur sendiri mengalami tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 5070.98 ribu jiwa dan pada tahun seterusnya bisa dikatakan bahwa Jawa Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi ini pasti terdapat sebab-sebab yang membuat tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan. Salah satunya ialah kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan harapan dan mendapatkan hasil yang sesuai.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keberhasilan bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi

tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya yaitu pertumbuhan tersebut menyebar pada pendapatan, termasuk pada penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin di dapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Siregar, 2008).

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. Nilai PDRB akan menunjukkan tingkat pembangunan masing-masing daerah tersebut, pada tahun 2012-2017 di Pulau Jawa Provinsi Jawa Timur memiliki nilai PDRB yang cukup tinggi. Pada tahun 2012 nilai PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar 1.124.464.64 milyar rupiah dan mengalami kenaikan setiap tahunnya, terakhir pada tahun 2017 nilai PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar 1.482.147.59 milyar rupiah. Nilai PDRB Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi nilai PDRB Jawa Timur nyatanya hal ini belum mampu untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

IPM sendiri memiliki beberapa peranan penting meliputi tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (daya beli) atau pendapatan. Peningkatan pendidikan seseorang sering dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi. Di samping pendidikan, kesehatan juga memiliki peranan terhadap

pertambahan pendapatan. Pengaruh kesehatan terhadap pendapatan diantaranya dengan perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan dan pengembangan potensi diri yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan (Lumbantoruan dan Hidayat, 2014).

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur (%)
2012	66.74
2013	67.55
2014	68.14
2015	68.95
2016	69.74
2017	70.27

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2012-2017

Pada tabel 1.2 faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan ialah indeks pembangunan manusia. Pada Tabel menunjukkan bahwa Indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Timur naik secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Timur sebesar 66.74% dan 70.27% terjadi pada 2017 tahun kemarin. Pemerintah dalam hal ini menunjukkan sudah bekerja dengan maksimal sehingga bisa mencapai hasil seperti sekarang ini.



Gambar 1.2
Tingkat Pengangguran (%)

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa Tingkat pengangguran diatas menunjukkan pengangguran tertinggi di Provinsi Jawa Timur terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4.47% dan pengangguran terendah terjadi pada tahun 2017 kemarin. Pengangguran pada tahun 2015 lalu dikarnakan adanya dampak krisis global yang juga sangat berpengaruh terhadap provinsi Jawa Timur.

Keadaan perekonomian dunia dan Indonesia serta kondisi dunia usaha dan pasar kerja tersebut jelas tergambar dalam keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur yang terefleksi dari hasil pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 yang lalu. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2014 sebelumnya sempat mengalami penurunan di banding periode sebelumnya hingga hanya 20,15 juta orang, namun pada Agustus 2015 kembali menjadi 20,27 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi angkatan kerja, telah terjadi penambahan atau peningkatan sekitar 125 juta orang. Dari sisi penyerapan angkatan kerja pun, pada Agustus 2014 tercatat adanya

tambahan penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 19,37 juta orang atau tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor/lapangan pekerjaan bertambah sebanyak 61 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2014. Tentunya hal ini memberikan gambaran yang positif tentang adanya geliat investasi di Jawa Timur dengan adanya lahan pekerjaan baru yang tersedia.

Namun demikian, tingginya penambahan angkatan kerja pada Agustus 2015 baik mereka yang benar-benar baru terjun ke pasar kerja maupun mereka yang memutuskan untuk beralih pekerjaan dan keluar dari pekerjaan lamanya ternyata tidak seiring dengan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi inilah yang mendorong semakin bertambahnya angkatan kerja yang terkategori sebagai penganggur. Pada Agustus 2015, tercatat bahwa terjadi penambahan jumlah penganggur di Jawa Timur sebanyak 63 ribu orang dibanding periode yang sama pada tahun 2014 menjadi 906 ribu orang. Selain hal di atas, penyebab lain bertambahnya tingkat pengangguran di Jawa Timur dapat disebabkan karena masih adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Jawa Timur yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja di Jawa Timur. *(sumber BPS Jawa Timur).*

Pemerintah dalam hal ini berwenang untuk mengatur roda perekonomian dengan menentukan penerimaan dan pengeluaran belanja pemerintahan. Menurut Wagner dalam Yulianita (2009:7) bahwa pengeluaran pemerintah memegang

peranan penting terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja tak terduga, serta bunga dan cicilan hutang. Pengeluaran pembangunan terdiri dari pembiayaan dan bantuan proyek.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2010-2017

Gambar 1.3

Belanja Total Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2017

Berdasarkan gambar 1.3 diatas bisa dilihat bahwa belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya meningkat dan membuahkan hasil bahwa tingkat kemiskinan berarti menurun setiap tahunnya. Dengan adanya masalah masalah seperti diatas maka penulis akan melakukakan penelitian dengan judul “**ANALISIS PENGARUH PDRB, IPM, TINGKAT PENGANGGURAN DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2017**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mencari tahu pokok permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas harga konstan tahun dasar 2010 terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen secara individual maupun simultan :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sedangkan Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademisi atau mahasiswa, Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan untuk bahan perbandingan objek penelitian yang sama khususnya tentang Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi pemerintah, Penelitian ini bisa digunakan guna memberikan masukan agar lebih peduli terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Bagi penulis atau peneliti, Penelitian ini sebagai pelaksanaan tugas akhir yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi yang disusun ini terdiri dari 5 bab. Adapun sistematika penulisan

skripsi adalah sebagai berikut :

1. **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan

2. **BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi kajian pustaka dari penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan referensi untuk permasalahan yang

akan diteliti, kerangka pemikiran, hipotesis dan landasan teori yang digunakan sebagai acuan.

3. BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan cara pengumpulan data yang dilakukan, definisi operasional, serta metode analisis yang digunakan.

4. BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil pengujian atas data penelitian yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta pembahasan yang lebih lanjut dari hasil penelitian dan analisis data.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan serta implikasi dari jawaban rumusan masalah.